BAB III
HAK NAFKAH ANAK MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN ORDINAN 43

A. Nafkah Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Kewajiban Nafkah

Pengaturan mengenai nafkah anak ini diatur di dalam Bab XII mengenai "Hak dan Kewajiban Suami Istri". Seterusnya pada Bab XIV "Pemeliharaan anak" yang dapat dilihat pada ketentuan- ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 106 KHI serta dalam ketentuan Pasal 156 KHI mengenai akibat perceraian pada Bab XVII tentang "Akibat Putusnya Perkawinan."

Pada konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, hubungan antara anak dan orang tuanya tidak terputus meskipun terjadi pembatalan atau perceraian dalam perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa status hukum anak tetap melekat, sehingga hak-haknya, termasuk hak atas nafkah, tetap harus dipenuhi oleh orang tuanya.

Pasal 80 ayat (4):

Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:

a. nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
c. biaya pendidikan bagi anak.[103]

Pasal 105:

[103] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, h. 24-25.

Dalam hal terjadinya perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.[104]

Pasal 156:

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
   1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu:
   2) ayah;
   3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah,
   4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,
   5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau Ibunya,
c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula,
d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.[105]

2. Anak yang Berhak Nafkah

[104] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, h. 31.

[105] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, h. 45-46.

1. Anak Sah

Dalam hukum keluarga Islam, status anak menjadi dasar penting dalam menentukan hak-hak keperdataannya, termasuk hak untuk memperoleh nafkah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas memberikan pengaturan mengenai status anak sah.

Pasal 98

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.[106]

Pasal 99

Anak yang sah adalah:

a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
b. hasil perbuatan suami istri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.[107]

2. Anak Luar Kawin

Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia turut mengatur mengenai kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan. Pengaturan ini menjadi penting mengingat status anak luar kawin sering kali menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait dengan penetapan nasab serta hak-hak keperdataannya. Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI)

[106] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, h. 29.

[107] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, h. 29-30.

tidak secara khusus menguraikan ketentuan mengenai hak nafkah bagi anak luar kawin, namun KHI tetap memberikan batasan yang jelas mengenai status hukum anak tersebut.

Pasal 100:

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.[108]

Dari pasal ini dijelaskan bahwa, anak luar kawin menurut Kompilasi Hukum Islam adalah seseorang yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak luar kawin terhadap ibu yang melahirkan mempunyai hubungan hukum secara otomatis walaupun tidak diakui secra tegas dan kedudukannya sama dengan anak yang sah yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah.[109]

3. Anak Angkat

Untuk kewajiban pemberian nafkah anak angkat dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 171 huruf (h):

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan.[110]

---

[108] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, h. 30.

[109] Muhammad Fikri Wardhana dan Mohamad Rafi'ie, "Analisis Yuridis Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Luar Nikah," *Jurnal Justicia Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang* Vol . 12 No. 1 (Maret 2023): h. 124.

[110] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, h. 51.

Atas dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa hak anak angkat dalam nafkah merupakan tanggung jawab dan kewajiban orang tua angkatnya untuk memenuhinya, namun terkait pertalian nasab, perwalian untuk menikah jika anak angkat perempuan, dan hak kewarisan tetap dinisbatkan pada orang tua kandungnya.[111]

3. Sanksi bagi yang melalaikan kewajiban nafkah

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur sanksi bagi pihak yang melalaikan kewajiban memberikan nafkah. KHI hanya memuat ketentuan normatif mengenai kewajiban ayah untuk menanggung nafkah anak dan mantan istri, namun tidak menetapkan bentuk hukuman atau tindakan hukum apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

B. Nafkah Anak Menurut Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001

1. Kewajiban Nafkah

Nafkah dalam bahasa Melayu dikenal dengan makna belanja atau sara hidup. Nafkah ialah mengeluarkan belanja atau sara hidup kepada mereka yang wajib ke atas seseorang sama ada isteri, anak dan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Ia termasuk keperluan tempat tinggal, makanan, pakaian, pendidikan, keagamaan dan perubatan.[112]

---

[111] Muhammad Khoirur Rofiq, *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, h. 135.

[112] Ahmad Ibrahim, *Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia* (Malayan Law Journal Sdn Bhd, 1999), h. 180.

Dalam Ordinan 43 Undang-undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 mengatur mengenai tanggung jawab setelah perceraian, khususnya berkaitan dengan nafkah anak. Pengaturan mengenai nafkah anak diatur secara jelas dalam Bahagian VI "Nafkah Isteri, Anak dan Lain-Lain", khususnya pada Seksyen 72 hingga Seksyen 81, serta Bahagian VII "Hadanah atau Penjagaan Kanak-Kanak". Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa seorang ayah bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak-anaknya, baik anak yang berada di bawah penjagaannya maupun di bawah penjagaan pihak lain, sesuai dengan kemampuan ayah dan kebutuhan anak tersebut.

Seksyen 72 Subseksyen 1:

Kewajipan untuk menanggung nafkah anak
Kecuali jika sesuatu perjanjian atau sesuatu perintah Mahkamah memperuntukkan selainnya, adalah menjadi kewajipan seseorang lelaki untuk menanggung nafkah anaknya, sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau dalam jagaan seseorang lain, sama ada dengan mengadakan bagi mereka itu tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan dan pendidikan sebagaimana yang munasabah memandang kepada kemampuan dan taraf kehidupannya atau dengan membayar kosnya.[113]

Seksyen 72 (1) menjelaskan bahwa ukuran untuk menentukan kadar nafkah anak mengikut seksyen di atas adalah mengikut ukuran munasabah berdasarkan kemampuan dan taraf kehidupan bapa. Dengan kata lain, jika bapa seorang yang miskin atau sederhana, maka kadar yang boleh dituntut hendaklah meliputi makan minum, pakaian, tempat tinggal, persekolahan

[113] Undang-Undang Sarawak: Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam, 2001 (2001), h. 54.

dan perubatan yang sekadar sahaja kecualilah jika bapa itu orang yang kaya.[114]

Seksyen 86:

Kelayakan-kelayakan yang perlu untuk penjagaan

Seseorang perempuan yang mempunyai hak mendidik seseorang kanak kanak adalah berhak menjalankan hak terhadap hadanah jika:

a. dia adalah seorang Islam;
b. dia adalah sempurna akal;
c. dia berumur yang melayakkan dia memberi kepada kanak-kanak itu jagaan, kasih sayang dan kasih mesra yang mungkin diperlukan oleh kanak-kanak itu;
d. dia berkelakuan baik dari sudut pandangan akhlak Islamiah; dan
e. dia tinggal di tempat di mana kanak-kanak itu tidak mungkin menghadapi apa-apa akibat buruk dari segi akhlak atau jasmani.[115]

Seksyen 88:

Jangka masa penjagaan

1. Hak hadinah bagi menjaga seseorang kanak-kanak adalah tamat setelah kanak-kanak itu mencapai umur tujuh tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu perempuan, tetapi Mahkamah boleh, atas permohonan hadinah, membenarkan dia menjaga kanak-kanak itu sehingga kanak-kanak itu mencapai umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur sebelas tahun, jika kanak-kanak itu perempuan.
2. Setelah tamatnya hak hadinah, penjagaan adalah turun kepada bapa, dan jika kanak-kanak itu telah mencapai umur kecerdikan (mumaiyiz), maka kanak-kanak itu adalah berhak memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapanya, melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya.[116]

2. Anak yang berhak Nafkah

1. Anak Sah

Seksyen 79:

---

[114] Najibah Mohd Zin, *Undang-undang Keluarga Islam* (Dawama Sdn. Bhd, 2007), h. 66.

[115] Undang-Undang Sarawak: Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam, 2001 (2001), h.63

[116] Undang-Undang Sarawak: Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam, 2001, h. 64.

Kecuali:

a. jika sesuatu perintah nafkah seseorang anak dinyata sebagai selama tempoh yang lebih singkat; atau
b. jika sesuatu perintah nafkah seseorang anak telah dibatalkan; atau
c. jika sesuatu perintah nafkah seseorang anak dibuat untuk-
   i. seseorang anak perempuan yang belum berkahwin atau yang, oleh sebab sesuatu hilang upaya dari segi mental atau jasmani, tidak berkebolehan menanggung nafkah dirinya;
   ii. seseorang anak lelaki yang, oleh sebab sesuatu hilang upaya dari segi mental atau jasmani, tidak berkebolehan menanggung nafkah dirinya,

perintah nafkah itu hendaklah tamat apabila anak itu mencapai umur lapan belas tahun, tetapi Mahkamah boleh, atas permohonan oleh anak itu atau oleh seseorang lain, melanjutkan perintah nafkah itu supaya meliputi apa-apa tempoh tambahan yang difikirkannya munasabah bagi membolehkan anak itu mengikuti pendidikan atau latihan lanjut atau lebih tinggi.[117]

Perintah nafkah anak akan berakhir atau dihentikan ketika anak mencapai usia 18 tahun kecuali terjadi salah satu dari hal berikut:

a. Ketika perintah nafkah anak dibuat untuk jangka waktu yang lebih pendek atau lebih awal dari itu.
b. Ketika perintah tersebut dicabut.
c. Ketika perintah tersebut dibuat untuk anak perempuan yang belum menikah atau yang karena ketidakmampuan mental atau fisik tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Dalam kasus anak laki-laki, karena ketidakmampuan mental atau fisik tidak mampu menghidupi dirinya sendiri.

Ini berarti bahwa anak laki-laki yang belum menikah, sehat, dan mampu menghidupi dirinya sendiri bukanlah beban bagi ayahnya. Namun, Mahkamah dapat, atas permohonan anak atau orang lain, memperpanjang

[117] Undang-Undang Sarawak: Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam, 2001, h. 57-58.

perintah nafkah untuk jangka waktu di masa mendatang yang dianggap wajar untuk memungkinkan anak tersebut melanjutkan atau meningkatkan pendidikan atau pelatihannya.[118]

Seksyen 92 Subseksyen 4:

Bagi maksud penjagaan ke atas diri dan harta, seseorang hendaklah disifatkan sebagai kanak-kanak belum dewasa melainkan dia telah genap umur 18 tahun.

2. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, baik akibat perzinaan maupun anak yang lahir kurang dari enam bulan sejak akad nikah dan bukan berasal dari persetubuhan syubhat. Terkait nafkah dan biaya pemeliharaannya, tanggung jawab tersebut dibebankan kepada ibu, karena anak luar kawin hanya dinasabkan kepada ibunya dan bukan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Menurut hukum Islam, kewajiban nafkah anak tidak sah tidak dapat dibebankan kepada laki-laki tersebut meskipun secara biologis ia merupakan ayahnya.[119]

Di Ordinan 43 mengatur terkait dengan kewajipan untuk menanggung nafkah anak-anak tak sah taraf (anak luar kawin).

Seksyen 80:

(1) Jika seseorang perempuan cuai atau enggan menanggung nafkah seseorang anaknya yang tak sah taraf yang tidak berupaya menanggung nafkah dirinya, melainkan seorang anak yang dilahirkan akibat rogol, Mahkamah boleh, apabila hal itu dibuktikan dengan sewajarnya, memerintahkan perempuan itu memberi apa-apa elaun bulanan yang difikirkan munasabah oleh Mahkamah.

[118] Najibah Mohd Zin, *Undang-undang Keluarga Islam*, h. 269-270.
[119] Najibah Mohd Zin, *Undang-undang Keluarga Islam*, h. 273.

(2) Elaun bulanan di bawah seksyen ini hendaklah kena dibayar dari tarikh bermulanya kecuaian atau keengganan menanggung nafkah itu atau dari sesuatu tarikh yang kemudian sebagaimana yang dinyatakan dalam perintah itu.[120]

Dalam hal seorang laki-laki menolak pengakuan terhadap seorang anak sebagai anak kandungnya, pengadilan wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan pembuktian nasab berdasarkan ketentuan hukum syarak guna menentukan secara jelas status keabsahan nasab anak tersebut.[121]

3. Anak Angkat

Seksyen 78:

1) Jika seseorang lelaki telah menerima seseorang kanak-kanak yang bukan anaknya sebagai seorang ahli keluarganya, maka adalah menjadi kewajipannya menanggung nafkah kanak-kanak itu semasa dia masih seorang kanak-kanak, setakat mana bapa dan ibu kanak-kanak itu tidak berbuat demikian, dan Mahkamah boleh membuat apa-apa perintah yang perlu bagi menjaminkan kebajikan kanak-kanak itu.
2) Kewajipan yang dipertanggungkan oleh subseksyen (1) hendaklah terhenti jika kanak-kanak itu dibawa balik oleh bapa atau ibunya.
3) Apa-apa wang yang dibelanjakan oleh seseorang lelaki pada menanggung nafkah seseorang kanak-kanak sebagaimana yang dikehendaki oleh subseksyen (1) boleh dituntut daripada bapa atau ibu kanak-kanak itu.[122]

Berdasarkan ketentuan tersebut, seorang laki-laki yang mengangkat dan memelihara anak yang bukan anak kandungnya sebagai anggota keluarga berkewajiban memberikan pemeliharaan dan nafkah selama anak tersebut masih memerlukan pengasuhan serta orang tua kandungnya belum menjalankan kewajiban tersebut. Selain itu, pihak yang telah mengeluarkan biaya untuk memelihara anak angkat tersebut berhak menuntut penggantian

[120] Undang-Undang Sarawak: Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam, 2001, h. 58.

[121] Najibah Mohd Zin, *Undang-undang Keluarga Islam*, h. 274.

[122] Undang-Undang Sarawak: Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam, 2001, h. 57.

biaya kepada ayah atau ibu kandung anak yang bersangkutan jika anak tersebut di ambil kembali.[123]

3. Sanksi bagi yang melalaikan kewajiban nafkah

Menurut Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001, terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur sanksi terhadap pihak yang melalaikan kewajiban nafkah.

Seksyen 74

Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan cagaraa diberi bagi nafkah seseorang anak

1. Mahkamah boleh, apabila memerintahkan pembayaran nafkah untuk faedah seseorang anak, memerintahkan orang yang bertanggungan membayar nafkah itu supaya memberi cagaran bagi kesemua atau mana-mana bahagian daripadanya dengan apa-apa harta pada pemegang-pemegang amanah sebagai amanah untuk membayar nafkah itu atau sebahagiannya daripada pendapatan harta itu.
2. Kemungkiran mematuhi perintah yang menghendaki orang yang bertanggungan membayar nafkah itu meletakhakkan apa-apa harta pada pemegang amanah bagi maksud subseksyen (1) boleh dikenakan hukuman sebagai suatu penghinaan terhadap Mahkamah.[124]

Seksyen 69:

Menuntut tunggakan nafkah

1. Tunggakan nafkah yang tak bercagar boleh dituntut sebagai suatu hutang daripada pihak yang mungkir dan, jika tunggakan itu terakru kena dibayar sebelum suatu perintah penerimaan dibuat terhadap pihak yang mungkir itu, tunggakan itu boleh dibuktikan dalam kebankrapannya dan, jika tunggakan itu terakru kena dibayar sebelum dia mati, tunggakan itu hendaklah menjadi suatu hutang yang kena dibayar daripada harta pusakanya.
2. Tunggakan nafkah yang tak bercagar yang terakru kena dibayar sebelum orang yang berhak kepadanya itu mati boleh dituntut sebagai suatu hutang olch wakil diri di sisi undang-undang orang itu.[125]

---

[123] Najibah Mohd Zin, *Undang-undang Keluarga Islam*, h. 272.

[124] Undang-Undang Sarawak: Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam, 2001, h.55-56

[125] Undang-Undang Sarawak: Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam, 2001, h. 53.

Seksyen 77:

Menuntut tunggakan nafkah seseorang anak
Seksyen 69 hendaklah dipakai, dengan pindaan yang sesuai dan mengikut Undang-Undang Islam, bagi perintah-perintah mengenai pembayaran nafkah untuk faedah seseorang anak.[126]

Berdasarkan Seksyen 77 Ordinan 43, nafkah anak hanya dapat dianggap sebagai utang apabila ayah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran nafkah setelah adanya perintah dari mahkamah. Dengan demikian, apabila tidak terdapat perintah nafkah yang dikeluarkan oleh mahkamah, maka nafkah tersebut tidak dapat dituntut sebagai utang maupun sebagai nafkah tertunggak.[127]

Seksyen 81:

Kuasa Mahkamah untuk membuat suatu perintah tahanan pendapatan-tenaga

1. Walau apa pun peruntukan mana-mana undang-undang bertulis yang berlawanan, Mahkamah boleh, atas permohonan oleh orang yang bagi faedahnya perintah nafkah itu dibuat atau penjaga orang tersebut, membuat suatu perintah tahanan pendapatan-tenaga, jika Mahkamah itu fikirkan patut berbuat sedemikian.
2. Suatu permohonan bagi perintah tahanan pendapatan-tenaga boleh dibuat dalam prosiding untuk mendapatkan suatu perintah nafkah atau dalam mana-mana prosiding kemudiannya.[128]

[126] Undang-Undang Sarawak: Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam, 2001, h. 56.

[127] Najibah Mohd Zin, *Undang-undang Keluarga Islam*, h. 271-272.

[128] Undang-Undang Sarawak: Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam, 2001, h. 58.